

EKSPEDISI EKSPLORASI KEBERAGAMAN BUDAYA NUSANTARA SEBAGAI RUANG PENGUATAN *CIVIC ENGAGEMENT*

Miranda Siregar¹, Asep Mahpudz², Ratna Fitria³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

¹mirandasiregar06@gmail.com, ²asepmahpudz@upi.edu, ³ratna_fitria@upi.edu

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Nusantara cultural diversity exploration expedition in strengthening civic engagement among nature-lover organization members through a comparative study of Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri and MAPACH UPI. This study employed a descriptive qualitative approach with purposively selected informants. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing using source and technique triangulation. The findings show that expeditions serve as spaces for civic engagement reflected in social engagement, volunteerism engagement, and cultural engagement. Differences in organizational characteristics indicate that Wanadri develops civic engagement through pioneering, exploration, humanity, and environmental orientations, while MAPACH UPI integrates civic engagement through an academic approach based on the Tri Dharma of Higher Education.

Keywords: *Civic engagement, Cultural Expedition, Nature-Lover Organization, Civic Education.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ekspedisi eksplorasi keberagaman budaya Nusantara dalam menguatkan *civic engagement* anggota organisasi pecinta alam melalui studi komparatif pada Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri dan MAPACH UPI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspedisi menjadi ruang keterlibatan kewargaan yang tercermin dalam bentuk social engagement, volunteerism engagement, dan cultural engagement. Perbedaan karakter organisasi menunjukkan bahwa Wanadri mengembangkan *civic engagement* melalui orientasi kepeloporan, penjelajahan, kemanusiaan, dan lingkungan, sedangkan MAPACH UPI melalui pendekatan akademik berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Civic engagement, Ekspedisi Budaya, Organisasi Pecinta Alam, Pendidikan Kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan

terbesar di dunia, terbentang dari

Sabang hingga Merauke dengan lebih

dari 17.000 pulau (Sugianto, 2023), memiliki kondisi geografis yang turut membentuk keragaman sosial dan budaya di tengah masyarakatnya (Attaulloh & Kusumawardani, 2025). Indonesia tercatat memiliki sekitar 300 kelompok etnis dengan warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, menjadikan keberagaman budaya sebagai identitas sekaligus modal sosial bangsa (Saputra dkk., 2025). Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan amanat Pasal 32 UUD 1945 menegaskan bahwa keberagaman bukan sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang harus dijaga melalui partisipasi aktif seluruh warga negara, bukan hanya pemerintah. Namun demikian, arus globalisasi dan budaya populer yang berkembang pesat berdampak pada menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal, sehingga keterlibatan mereka dalam pelestarian budaya dan kehidupan bermasyarakat turut melemah. Kondisi ini menuntut hadirnya model pendidikan kewarganegaraan yang tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi menumbuhkan keterlibatan nyata warga negara dalam kehidupan sosial.

Keterlibatan tersebut, dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, dikenal sebagai *civic engagement*. Adler dan Goggin (2005) mendefinisikan *civic engagement* sebagai cara warga negara berpartisipasi dalam kehidupan komunitasnya untuk mewujudkan masa depan bersama, yang mencakup rentang aktivitas mulai dari partisipasi individual hingga keterlibatan kolektif dalam persoalan publik. Definisi ini relevan dengan konteks penelitian ini karena kegiatan ekspedisi eksplorasi keberagaman budaya Nusantara pada dasarnya adalah bentuk partisipasi kolektif anggota organisasi pecinta alam, yaitu organisasi sosial yang menghimpun individu dengan kesamaan minat dan kepedulian terhadap aktivitas alam terbuka serta berperan dalam pengembangan tanggung jawab anggotanya (Hendrawan dkk., 2024), dalam merawat kehidupan bersama, baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat di wilayah tujuan ekspedisi. Checkoway (2013) memperluas pemahaman ini dengan menegaskan bahwa *civic engagement* pada generasi muda tidak selalu tumbuh melalui jalur

formal seperti sekolah atau partai politik, tetapi juga melalui komunitas dan organisasi kepemudaan yang memberi ruang bagi mereka untuk terlibat langsung dalam isu sosial dan lingkungan. Pandangan Checkoway menjadi dasar argumentasi bahwa organisasi pecinta alam, sebagai komunitas nonformal, berpotensi menjadi ruang penguatan penumbuhan *civic engagement* generasi muda yang setara dengan jalur pendidikan formal.

Untuk memahami bagaimana keterlibatan tersebut dapat diukur dan dikembangkan, Hoskins dan Mascherini (2009) mengemukakan konsep *civic competence* sebagai kombinasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memungkinkan seseorang berpartisipasi aktif secara demokratis, mencakup dimensi partisipasi politik, nilai-nilai kewargaan, partisipasi masyarakat sipil, hingga partisipasi sosial di lingkungan sekitar. Dimensi partisipasi masyarakat sipil dan partisipasi sosial dalam kerangka Hoskins dan Mascherini sejalan dengan aktivitas ekspedisi yang dikaji dalam penelitian ini, yakni interaksi anggota dengan masyarakat lokal, kerja sama lintas komunitas, dan

kegiatan pengabdian yang dilaksanakan selama ekspedisi berlangsung. Dengan demikian, kompetensi kewargaan tidak hanya dibentuk melalui kurikulum, tetapi juga melalui pengalaman lapangan yang menuntut anggota mempraktikkan nilai-nilai tersebut secara langsung.

Branson (1998) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus mengembangkan tiga komponen utama, yaitu pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), keterampilan kewargaan (*civic skills*), dan disposisi kewargaan (*civic dispositions*), yang ketiganya saling berkaitan dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Ketiga komponen tersebut menjadi kerangka analisis yang tepat untuk membaca pengalaman anggota Wanadri dan MAPACH UPI selama ekspedisi, karena kegiatan penelitian budaya, interaksi dengan tokoh adat, hingga pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya adalah proses penanaman pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewargaan secara simultan di luar ruang kelas. Berdasarkan kerangka teoretis Adler dan Goggin, Checkoway, Hoskins dan Mascherini, serta Branson tersebut, penelitian ini memandang kegiatan

ekspedisi eksplorasi keberagaman budaya Nusantara bukan sekadar aktivitas kepecintaalaman, melainkan proses pendidikan kewarganegaraan berbasis pengalaman (*experiential civic education*) yang berlangsung di ruang nonformal.

Penelitian terdahulu memperkuat asumsi tersebut. Mentari dkk. (2024) menemukan bahwa kecerdasan interpersonal berkontribusi terhadap *civic engagement* warga negara muda, sedangkan Alawiyah dkk. (2025) menunjukkan bahwa pengalaman lapangan mahasiswa melalui program berbasis komunitas mampu menumbuhkan makna *civic engagement* yang lebih mendalam dibandingkan pembelajaran di kelas. Hidayah dkk. (2025) turut menegaskan pentingnya penguatan *civic engagement* berbasis nilai Pancasila untuk membangun kesadaran konstitusional warga negara di era digital. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti organisasi pecinta alam, baik yang bersifat independen maupun berbasis kampus, sebagai ruang penguatan *civic engagement* melalui kegiatan ekspedisi budaya masih terbatas. Kekosongan inilah yang mendasari penelitian ini

mengkaji dua organisasi dengan karakter berbeda, yaitu KPA Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri yang berlandaskan empat pilar (pendidikan, penjelajahan, kemanusiaan, dan lingkungan), dan MAPACH UPI yang mengintegrasikan ekspedisi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, guna menganalisis bagaimana pelaksanaan ekspedisi berperan menguatkan *civic engagement* anggotanya serta bagaimana perbedaan karakter organisasi memaknai penguatan tersebut secara berbeda.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan dan peran ekspedisi eksplorasi keberagaman budaya Nusantara dalam menguatkan *civic engagement*. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* terhadap delapan narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan ekspedisi, yaitu Tomy Hosni Mubaraq (Ketua Dewan Pengurus Wanadri), Mochamad Azis (Ketua Pelaksana

Ekspedisi Wanadri), Hasbi dan Radifan (Anggota Pelaksana Ekspedisi Wanadri), Muhammad Bagas Rafif (Ketua Adat MAPACH UPI), Epi Pitriani (Ketua Pelaksana Ekspedisi MAPACH UPI), serta Purnama Abdul Wahid dan Diki Okdiansyah (Anggota Pelaksana Ekspedisi MAPACH UPI).

Data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi tidak langsung, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan keterangan antarnarasumber dari kedua organisasi, dan triangulasi teknik, dengan membandingkan hasil wawancara terhadap data observasi dan dokumentasi kegiatan ekspedisi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan ekspedisi pada kedua organisasi berlangsung sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada Wanadri, sebagaimana dijelaskan Tomy Hosni Mubaraq, rencana ekspedisi diajukan

kepada Bidang II Operasi untuk dikaji kelayakannya, kemudian dikoordinasikan dengan Bidang V Pendidikan dan Latihan (Diklat) sebagai bagian

dari pembinaan dan kesiapan anggota, dengan proses perencanaan berlangsung sekitar sembilan bulan sebelum keberangkatan. Pada MAPACH UPI, Epi Pitriani menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan penentuan tema dan lokasi berdasarkan kajian potensi budaya, dilanjutkan dengan penyusunan proposal, pembentukan kepanitiaan, serta pembekalan melalui bina jasmani, dengan menerapkan pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi, pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan media. Berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif Pengembangan Organisasi menurut Yukl (2013) dan konsep civic engagement menurut Adler dan Goggin (2005), pelaksanaan Program Ekspedisi Eksplorasi Keberagaman Budaya Nusantara pada KPA Wanadri maupun MAPACH UPI sama-sama menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan civic engagement anggota. Meskipun kedua organisasi memiliki

karakteristik kelembagaan dan orientasi kegiatan yang berbeda, keduanya mengembangkan program ekspedisi sebagai media pembelajaran yang mampu membentuk pengetahuan, nilai, serta partisipasi anggota dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari pengembangan organisasi Yukl (2013), KPA WANADRI dan MAPACH UPI sama-sama menunjukkan bahwa keberhasilan program ekspedisi didukung oleh kepemimpinan yang efektif, komunikasi dan koordinasi yang terstruktur, kerja sama tim yang kuat, budaya organisasi yang menjadi pedoman perilaku anggota, serta evaluasi program yang berorientasi pada pembelajaran organisasi. Kelima aspek tersebut saling berkaitan dalam membangun efektivitas organisasi sehingga kegiatan ekspedisi dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan organisasi menjadi fondasi utama yang memungkinkan kegiatan ekspedisi berjalan sesuai dengan tujuan organisasi sekaligus menjadi sarana pengembangan kapasitas anggota.

Meskipun memiliki kesamaan dalam aspek pengembangan

organisasi, kedua organisasi memperlihatkan karakteristik yang berbeda. KPA WANADRI menerapkan sistem organisasi yang lebih formal dan berorientasi pada manajemen operasional ekspedisi, terutama melalui mekanisme persetujuan kegiatan oleh Bidang II Operasi dan koordinasi bersama Bidang V Pendidikan dan Latihan (Diklat). Kepemimpinan, komunikasi, serta evaluasi lebih difokuskan pada pengelolaan risiko, kesiapan teknis, keselamatan anggota, dan dokumentasi hasil eksplorasi. Sebaliknya, MAPACH UPI mengembangkan organisasi melalui pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan pengurus dan anggota dalam proses perencanaan, serta memperkuat kolaborasi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi, pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan media. Selain itu, pengembangan organisasi di MAPACH UPI juga diarahkan untuk mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perbedaan orientasi pengembangan organisasi tersebut berimplikasi pada bentuk civic

engagement yang berkembang pada anggota. Berdasarkan konsep Adler dan Goggin (2005), baik KPA WANADRI dan MAPACH UPI sama-sama berkontribusi dalam meningkatkan civic knowledge, civic culture, dan civic participation. Pada aspek civic knowledge, kedua organisasi memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperoleh pengetahuan mengenai keberagaman budaya, kondisi sosial masyarakat, sejarah lokal, serta karakteristik wilayah melalui pengalaman langsung di lapangan. Pembelajaran kontekstual tersebut memperluas wawasan anggota mengenai kehidupan masyarakat Indonesia sehingga memperkuat pemahaman mereka sebagai warga negara.

Pada aspek civic culture, kedua organisasi berhasil menanamkan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman budaya, kepedulian sosial, kemampuan bekerja sama, serta penghormatan terhadap adat istiadat masyarakat setempat. Interaksi langsung dengan masyarakat selama ekspedisi menjadi proses internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang membentuk karakter anggota. Namun demikian, budaya kewargaan yang berkembang

memiliki penekanan yang berbeda. KPA WANADRI lebih menonjolkan nilai pendidikan, penjelajahan, kemanusiaan, dan pelestarian lingkungan sebagai identitas organisasinya, sedangkan MAPACH UPI mengintegrasikan nilai-nilai kewargaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penelitian budaya, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan tanggung jawab sosial mahasiswa.

Pada aspek civic participation, kedua organisasi menunjukkan bahwa anggota tidak hanya menjadi peserta ekspedisi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Di KPA WANADRI, partisipasi diwujudkan melalui kegiatan dokumentasi budaya, pelayanan kesehatan, eksplorasi wilayah, serta penyebarluasan hasil ekspedisi melalui laporan, seminar, dan publikasi. Sementara itu, pada MAPACH UPI, partisipasi anggota diwujudkan melalui penelitian budaya, Safari Sadar Hukum, konservasi lingkungan, seminar, riset kolaboratif, serta berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, partisipasi anggota

pada MAPACH UPI cenderung lebih berorientasi pada implementasi fungsi akademik, sedangkan KPA WANADRI lebih berorientasi pada kontribusi sosial melalui kegiatan eksplorasi dan kemanusiaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Yukl (2013) memiliki hubungan yang erat dengan terbentuknya civic engagement sebagaimana dikemukakan oleh Adler dan Goggin (2005). Kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang baik, kerja sama tim, budaya organisasi, dan evaluasi program menjadi faktor yang memungkinkan anggota memperoleh pengalaman belajar yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan kewargaan (civic knowledge), budaya kewargaan (civic culture), dan partisipasi kewargaan (civic participation). Dengan kata lain, efektivitas organisasi berkontribusi secara langsung terhadap proses pembentukan civic engagement anggota melalui pelaksanaan program ekspedisi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Program Ekspedisi Eksplorasi Keberagaman Budaya Nusantara pada KPA

WANADRI dan MAPACH UPI sama-sama berperan dalam meningkatkan civic engagement anggota, namun melalui karakteristik yang berbeda. KPA WANADRI lebih menekankan penguatan kapasitas anggota melalui sistem organisasi yang terstruktur, pengalaman ekspedisi, pendidikan kecintaan, dan kegiatan kemanusiaan. Sementara itu, MAPACH UPI lebih menekankan integrasi kegiatan ekspedisi dengan pendidikan tinggi melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya organisasi yang lebih unggul, melainkan memperlihatkan bahwa karakteristik organisasi memengaruhi strategi yang digunakan dalam membangun civic engagement. Dengan demikian, kedua organisasi memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam membentuk anggota yang memiliki pengetahuan kewargaan, budaya kewargaan, dan partisipasi aktif sebagai warga negara melalui kegiatan ekspedisi eksplorasi keberagaman budaya Nusantara.

“Setiap perjalanan selalu memberikan perspektif baru karena

peserta datang sebagai orang luar yang belum mengenal kondisi masyarakat maupun budaya di daerah tujuan. Perbedaan bahasa dan adat istiadat yang ditemui tidak menjadi penghalang membangun komunikasi karena seluruh masyarakat tetap dapat dipersatukan melalui bahasa Indonesia.” (Wawancara, Mochamad Azis, Ketua Pelaksana Ekspedisi Wanadri).

Pernyataan tersebut menunjukkan tahap observasi reflektif, ketika pengalaman konkret di lapangan direfleksikan menjadi kesadaran baru mengenai keberagaman Indonesia, sejalan dengan pandangan bahwa perbedaan bahasa dan adat di berbagai wilayah tetap dapat dipersatukan oleh bahasa dan nilai kebangsaan (Koto dkk., 2024). Refleksi ini kemudian dikonseptualisasikan secara abstrak oleh Hasbi, Anggota Pelaksana Ekspedisi Wanadri, yang memaknai keberagaman internal organisasi, baik dari segi usia, latar belakang pendidikan, maupun profesi anggota, sebagai kekuatan kolektif tim ekspedisi.

“Ekspedisi tidak dapat diselesaikan secara individual karena seluruh anggota saling bergantung

satu sama lain. Sebelum melaksanakan eksplorasi, tim selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat untuk memahami adat, budaya, dan kebiasaan yang berlaku sebagai bentuk penghormatan sekaligus membangun kepercayaan.” (Wawancara, Hasbi, Anggota Pelaksana Ekspedisi Wanadri).

Pemahaman tersebut kemudian diwujudkan dalam eksperimentasi aktif, sebagaimana dialami Radifan ketika tim menghadapi keraguan masyarakat akibat mitos kawasan berbahaya di Sungai Kayan. Alih-alih mengabaikan pandangan tersebut, tim mempelajari kondisi lapangan dan membangun komunikasi hingga masyarakat memahami maksud kedatangan tim.

“Keberhasilan ekspedisi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam menjelajahi alam, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan dan menghargai pandangan masyarakat.” (Wawancara, Radifan, Anggota Pelaksana Ekspedisi Wanadri).

Muhammad Bagas Rafif, Ketua Adat MAPACH UPI, mengalami secara langsung perbedaan intonasi bicara masyarakat Sumatra yang

terdengar lebih keras dibandingkan masyarakat Jawa Barat pada Ekspedisi Banda Neira 2025 dan Ekspedisi Kerinci 2026. Setelah berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat setempat, ia memahami bahwa perbedaan tersebut merupakan karakter budaya, bukan bentuk kemarahan. Purnama Abdul Wahid, Anggota Pelaksana Ekspedisi MAPACH UPI, memperoleh pengalaman langsung melalui interaksi dengan masyarakat di Desa Kete Kesu, Sulawesi, yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya civic responsibility dan ecological citizenship dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kegiatan ekspedisi merupakan aktualisasi dari nilai-nilai civic responsibility, civic awareness, community civic, dan ecological citizenship. Pengalaman lapangan merupakan hal yang tidak dapat tergantikan karena mampu menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian budaya sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keberagaman.” (Wawancara, Purnama Abdul Wahid, Anggota Pelaksana Ekspedisi MAPACH UPI).

Temuan ini memperkuat pandangan Checkoway (2013) bahwa civic engagement generasi muda tumbuh melalui pengalaman langsung dalam komunitas, bukan semata melalui instruksi formal. Anggota tidak diajarkan konsep toleransi dan tanggung jawab sosial secara tekstual, melainkan mengalaminya secara konkret di lapangan, merefleksikannya, lalu mempraktikkannya kembali dalam interaksi berikutnya, sehingga terbentuk civic competence sebagaimana dimaksud Hoskins dan Mascherini (2009) secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, bentuk civic engagement yang ditemukan melalui kegiatan ekspedisi dianalisis ke dalam tiga bentuk keterlibatan, yaitu social engagement, volunteerism engagement, dan cultural engagement. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga bentuk tersebut hadir secara bersamaan dalam kegiatan ekspedisi pada kedua organisasi, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Social engagement tampak melalui interaksi dan kerja sama anggota dengan masyarakat lokal, tokoh adat, serta komunitas pecinta alam setempat,

yang menuntut anggota membangun komunikasi dan kepercayaan sebelum melaksanakan eksplorasi, sebagaimana dijelaskan oleh Hasbi dan Radifan. Volunteerism engagement tercermin dari kontribusi tenaga, waktu, dan keterampilan anggota secara sukarela dalam kegiatan kemanusiaan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan Wanadri di sekitar lokasi ekspedisi, sebagaimana diungkapkan Mochamad Azis, serta program Safari Sadar Hukum dan penanaman bibit mangrove yang dilakukan MAPACH UPI pada Ekspedisi Banda Neira 2025, sebagaimana disampaikan Diki Okdiansyah.

“Kegiatan ekspedisi bukan sekadar perjalanan atau rekreasi, melainkan sarana untuk mengenal, memahami, dan menjaga keberagaman budaya Indonesia secara langsung... kegiatan ekspedisi juga menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan, dan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian budaya.” (Wawancara, Diki Okdiansyah, Anggota Pelaksana Ekspedisi MAPACH UPI).

Sementara itu, cultural engagement terwujud melalui

penghormatan dan pemahaman anggota terhadap adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat di wilayah tujuan, seperti penelitian budaya mengenai Tradisi Adat Kenduri Sko di Kota Sungai Penuh yang dilakukan MAPACH UPI. Ketiga bentuk civic engagement ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait: interaksi sosial membuka ruang bagi kontribusi sukarela, dan kontribusi sukarela tersebut pada gilirannya memperdalam pemahaman budaya. Rangkaian ini menegaskan argumen Adler dan Goggin (2005) bahwa civic engagement merupakan spektrum aktivitas yang saling bertautan, bukan kategori yang terpisah, sehingga sebuah kegiatan tunggal seperti ekspedisi dapat sekaligus menjadi ruang bagi tumbuhnya ketiga bentuk keterlibatan tersebut.

Analisis Komparatif: Persamaan dan Perbedaan Makna Civic Engagement pada Wanadri dan MAPACH UPI

Secara struktural, Wanadri dan MAPACH UPI menunjukkan persamaan mendasar dalam membangun civic engagement, yaitu keduanya menempatkan interaksi langsung dengan masyarakat sebagai

inti kegiatan, bukan sekadar pelengkap penjelajahan alam. Keduanya juga sama-sama mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil ekspedisi, baik melalui karya tulis, publikasi, maupun seminar, sehingga manfaat kegiatan tidak berhenti pada pengalaman

personal anggota, melainkan menjadi kontribusi yang dapat diakses masyarakat luas. Persamaan ini menegaskan bahwa terlepas dari perbedaan struktur organisasi, kedua komunitas menyadari bahwa keabsahan sebuah ekspedisi turut ditentukan oleh manfaat yang dihasilkan bagi pihak di luar organisasi, bukan semata pencapaian personal maupun kelompok.

Namun, perbedaan karakter organisasi menghasilkan makna civic engagement yang berbeda secara kualitatif. Wanadri, sebagai organisasi independen yang berlandaskan empat pilar, yaitu pendidikan, penjelajahan, kemanusiaan, dan lingkungan, membangun civic engagement melalui pengalaman menghadapi risiko dan ketidakpastian alam yang menuntut kepeloporan, ketangguhan, dan kepemimpinan kolektif. Tantangan seperti hanyutnya logistik

di Sungai Kayan atau keraguan masyarakat terhadap mitos kawasan berbahaya memaksa anggota mempraktikkan tanggung jawab kewargaan dalam kondisi yang penuh tekanan, sehingga civic responsibility yang terbentuk cenderung berciri tangguh dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara mandiri di lapangan.

MAPACH UPI sebagai organisasi berbasis kampus mengintegrasikan ekspedisi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan melalui pembekalan dan sosialisasi nilai kewarganegaraan di Pondok Pesantren Al-Khafidh, penelitian melalui kajian Tradisi Kenduri Sko, dan pengabdian melalui program Safari Sadar Hukum serta konservasi mangrove. Struktur ini menjadikan civic engagement pada MAPACH UPI lebih bercorak akademik-kolaboratif, sebagaimana tampak dari penerapan pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi, pemerintah, masyarakat, dan media secara terencana. Jika pada Wanadri kesadaran kewargaan tumbuh melalui pengalaman bertahan dan memimpin di tengah tantangan alam, pada MAPACH UPI kesadaran tersebut tumbuh melalui proses riset

dan pengabdian yang terstruktur sebagai bagian dari tanggung jawab akademik mahasiswa.

Perbedaan ini sejalan dengan pandangan Hoskins dan Mascherini (2009) bahwa civic competence dapat tumbuh melalui jalur yang beragam sesuai konteks kelembagaan tempat individu berada, tanpa harus seragam bentuknya. Dengan demikian, perbedaan karakter Wanadri dan MAPACH UPI bukan menunjukkan tingkat civic engagement yang lebih tinggi atau rendah pada salah satu organisasi, melainkan menegaskan bahwa civic engagement dapat dibentuk melalui jalur kelembagaan yang berbeda, yaitu jalur kemandirian komunitas pada Wanadri dan jalur integrasi akademik pada MAPACH UPI, yang keduanya secara setara berkontribusi membentuk warga negara yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab.

Analisis Komparatif: Persamaan dan Perbedaan Makna Civic Engagement pada Wanadri dan MAPACH UPI

Secara struktural, Wanadri dan MAPACH UPI menunjukkan persamaan mendasar dalam membangun civic engagement, yaitu keduanya menempatkan interaksi

langsung dengan masyarakat sebagai inti kegiatan, bukan sekadar pelengkap penjelajahan alam. Keduanya juga sama-sama mendokumentasikan dan menyebarkan hasil ekspedisi, baik melalui karya tulis, publikasi, maupun seminar, sehingga manfaat kegiatan tidak berhenti pada pengalaman

personal anggota, melainkan menjadi kontribusi yang dapat diakses masyarakat luas. Persamaan ini menegaskan bahwa terlepas dari perbedaan struktur organisasi, kedua komunitas menyadari bahwa keabsahan sebuah ekspedisi turut ditentukan oleh manfaat yang dihasilkan bagi pihak di luar organisasi, bukan semata pencapaian personal maupun kelompok.

Namun, perbedaan karakter organisasi menghasilkan makna civic engagement yang berbeda secara kualitatif. Wanadri, sebagai organisasi independen yang berlandaskan empat pilar, yaitu pendidikan, penjelajahan, kemanusiaan, dan lingkungan, membangun civic engagement melalui pengalaman menghadapi risiko dan ketidakpastian alam yang menuntut kepeloporan, ketangguhan, dan kepemimpinan kolektif.

Tantangan seperti hanyutnya logistik di Sungai Kayan atau keraguan masyarakat terhadap mitos kawasan berbahaya memaksa anggota mempraktikkan tanggung jawab kewargaan dalam kondisi yang penuh tekanan, sehingga civic responsibility yang terbentuk cenderung berciri tangguh dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara mandiri di lapangan.

MAPACH UPI sebagai organisasi berbasis kampus mengintegrasikan ekspedisi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan melalui pembekalan dan sosialisasi nilai kewarganegaraan di Pondok Pesantren Al-Khafidh, penelitian melalui kajian Tradisi Kenduri Sko, dan pengabdian melalui program Safari Sadar Hukum serta konservasi mangrove. Struktur ini menjadikan civic engagement pada MAPACH UPI lebih bercorak akademik-kolaboratif, sebagaimana tampak dari penerapan pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi, pemerintah, masyarakat, dan media secara terencana. Jika pada Wanadri kesadaran kewargaan tumbuh melalui pengalaman bertahan dan memimpin di tengah tantangan alam, pada MAPACH UPI kesadaran

tersebut tumbuh melalui proses riset dan pengabdian yang terstruktur sebagai bagian dari tanggung jawab akademik mahasiswa.

Perbedaan ini sejalan dengan pandangan Hoskins dan Mascherini (2009) bahwa civic competence dapat tumbuh melalui jalur yang beragam sesuai konteks kelembagaan tempat individu berada, tanpa harus seragam bentuknya. Dengan demikian, perbedaan karakter Wanadri dan MAPACH UPI bukan menunjukkan tingkat civic engagement yang lebih tinggi atau rendah pada salah satu organisasi, melainkan menegaskan bahwa civic engagement dapat dibentuk melalui jalur kelembagaan yang berbeda, yaitu jalur kemandirian komunitas pada Wanadri dan jalur integrasi akademik pada MAPACH UPI, yang keduanya secara setara berkontribusi membentuk warga negara yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa program ekspedisi eksplorasi keberagaman budaya Nusantara berfungsi sebagai proses pendidikan kewarganegaraan berbasis pengalaman yang menguatkan civic engagement anggota organisasi

pecinta alam melalui siklus experiential learning Kolb (1984), mulai dari pengalaman konkret di lapangan, refleksi atas interaksi dengan masyarakat, konseptualisasi nilai toleransi dan tanggung jawab, hingga eksperimentasi aktif dalam bentuk kerja sama dan pengabdian. Ketiga bentuk civic engagement, yaitu social, volunteerism, dan cultural engagement, hadir secara bertautan dalam kegiatan ekspedisi pada kedua organisasi, sejalan dengan pandangan Adler dan Goggin (2005) bahwa keterlibatan warga negara merupakan spektrum yang saling terhubung, serta konsisten dengan kerangka Branson (1998) mengenai keterpaduan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewarganegaraan. Perbedaan karakter organisasi, Wanadri yang berorientasi pada kepeloporan dan penjelajahan dalam bingkai empat pilar. MAPACH UPI yang mengintegrasikan ekspedisi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menghasilkan jalur pembentukan civic competence yang berbeda sebagaimana dikemukakan Hoskins dan Mascherini (2009), namun keduanya setara nilainya dalam membentuk warga negara yang aktif, toleran, dan peduli terhadap

masyarakat serta lingkungan. Temuan ini memperkuat argumen Checkoway (2013) bahwa komunitas dan organisasi kepemudaan nonformal dapat menjadi ruang penguatan civic engagement yang setara dengan jalur pendidikan formal. Penelitian ini merekomendasikan agar organisasi pecinta alam, baik independen maupun berbasis kampus, terus mengintegrasikan dimensi kewarganegaraan secara sengaja dalam setiap tahap ekspedisinya, serta agar kajian Pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya memperluas eksplorasi ruang-ruang nonformal serupa sebagai ruang penguatan pembentukan warga negara yang partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, R. P., & Goggin, J. (2005). What do we mean by "civic engagement"? *Journal of Transformative Education*, 3(3), 236–253.
<https://doi.org/10.1177/1541344605276792>
- Alawiyah, R. R., Martini, E., & Pandikar, E. (2025). Menggali makna pengalaman mahasiswa mengembangkan civic engagement melalui Kampus Mengajar. *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan*, 7(2), 27–34.

- Attaulloh, I. F., & Kusumawardani, S. (2025). Pengaruh karakteristik alam terhadap kehidupan masyarakat. Seminar Nasional dan Publikasi Ilmiah FIP UMJ, 1904–1913.
- Branson, M. S. (1998). The role of civic education: A forthcoming education policy task force position paper from the Communitarian Network. Center for Civic Education.
- Checkoway, B. (2013). Education for democracy by young people in community-based organizations. *Youth & Society*, 45(3), 389–403. <https://doi.org/10.1177/0044118X1419517>
- Hendrawan, K. T., Andrianto, J. R., & Muslimin. (2024). Penguatan organisasi pecinta alam (green campus) melalui diklatsar. *The Educational Research of TEKIBA*, 4(2), 176–183. <https://doi.org/10.36526/tekiba.v4i2.4673>
- Hidayah, Y., Trihastuti, M., Hakiki, M., & Fadli, R. (2025). Penguatan civic engagement berbasis Pancasila untuk membangun kesadaran konstitusional menuju warga negara yang baik dan berkelanjutan pada era digital. *Jurnal Studi Sosial*, 13(1).
- Hoskins, B., & Mascherini, M. (2009). Measuring active citizenship through the development of a composite indicator. *Social Indicators Research*, 90(3), 459–488. <https://doi.org/10.1007/s11205-008-9271-2>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.
- Koto, C. A. N., Lana, F. H., & Rosdiana, I. (2024). Pemersatu bangsa dalam keberagaman: Bahasa Indonesia. *Karimah Tauhid*, 4(8), 1–8. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.20242>
- Mentari, A., Yumanda, D., Putri, D. S., & Rohman. (2024). Kecerdasan interpersonal dalam membentuk civic engagement warga negara muda. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 490–496. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/about>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Saputra, I., Zamzamia, I., & Setiyoko, D. T. (2025). Keragaman budaya sebagai identitas bangsa: Studi multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 30778–30786. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.32143>
- Sugianto, T. (2023). Keberagaman budaya Indonesia. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra*, 3(06), 13–16. <https://doi.org/10.69957/tanda.v3i06.1967>
- Yukl, G. A. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Pearson.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.